

BAB 1

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah desa adalah tingkat pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diberikan wewenang untuk melakukan pembangunan desa serta mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya. Dalam mengelola keuangan pemerintah desa dituntut untuk dapat memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kasus korupsi. Para pihak yang terlibat dalam penyelewengan dana desa ini terjadi pada berbagai tingkat (desa, kecamatan) dan pada berbagai tahapan pengelolaan keuangan. Permainan anggaran yang dilakukan oleh para aktor tersebut terjadi selama proses perencanaan maupun pencairan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Demak pada tahun 2019, terjadi penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Penyelewengan tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp 570,9 juta ke kas Negara. Penggelapan pertama kali pada terjadi pada dana tahap III yang di cairkan sebanyak 3 kali, masing-masing Rp 168 Juta, Rp 50 juta, dan Rp 200,5 juta. Pengelolaan keuangan desa tidak seluruhnya melalui rekening kas desa. Sekitar Rp 103,3 juta dari penerimaan hasil lelang tanah bondo desa dan bengkok kosong perangkat desa juga diselewengkan. Kemudian uang pajak belanja yang dipungut kaur keuangan tidak disetorkan ke kas Negara, namun digunakan untuk kepentingan pribadi (Arifin, 2020).

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020. Kepala desa Loireng Kecamatan Sayung menyelewengkan dana desa sebesar Rp 302 juta. Kejari Demak melalui Pisdu Samsul Sitinjak, S.H menuturkan “Dugaan korupsi terjadi pada awal tahun 2020, dan telah diupayakan penyelesaian internal di Inspektorat Kabupaten Demak. Namun hingga tahun 2021, terdakwa tidak bisa mengembalikan keseluruhan uang milik negara yang di korupsi, sehingga diproses secara hukum”. Dana yang dikorupsi merupakan dana untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebesar Rp. 140,1 juta dan penyertaan modal BUMDES Mandiri Sejahtera Rp 162.947.550. Tercatat ada 4 kali penarikan yaitu pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp 250 juta di Bank Jateng Cabang Jalan Pemuda Semarang, 29 Februari 2020 sebesar Rp 50 Juta di Bank Jateng cabang Demak, pada 9 Maret 2020 Rp. 10 Juta di Bank Jateng Cabang Simpang Lima, pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp 10 juta di Bank Jateng Cabang Jalan Pemuda Semarang. Dari 4 kali pencairan, dua diantaranya memalsukan tanda tangan bendahara (Hamid, 2022).

Korupsi termasuk salah satu jenis fraud. Fraud sendiri bisa diartikan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Fraud bisa berupa pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Adanya korupsi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa belum dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut tentunya bisa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang seharusnya dapat memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah telah dimanipulasi dengan sengaja, sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan tidak bisa dipercaya.

Kasus diatas tentunya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Pemerintah sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola keuangan desa tentunya harus bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan baik. Penelitian ini sesuai dengan *stewardship theory*, yaitu hubungan yang berlandaskan kepercayaan, pemerintah desa dipandang sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan tindakan yang baik bagi kepentingan publik dan pemangku kepentingan yaitu dengan membuat

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas, sehingga tujuan ekonomi bisa terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Atikah, 2019).

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Aparatur Desa. Pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah desa dapat diwujudkan melalui pertanggungjawaban melalui laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa yang baik (Zuhroh, 2021).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan dukungan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi. Salah satu penerapan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara komputerisasi. Dengan adanya SISKEUDES dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin(BPKP).

Sistem Pengendalian Intern berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran, menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku. Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat serta dapat meyakinkan masyarakat desa tentang keakuratan, keandalan, dan efisiensi laporan keuangan desa (Atikah, 2019

).

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (KSAP). Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, termasuk Pemerintah Desa untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan dilakukan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja (Yuliana, 2020).

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Atikah, 2019) yaitu dengan penambahan variabel yaitu Standar akuntansi pemerintah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menggunakan variabel independen Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintah, serta pengujian dilakukan menggunakan PLS dan objek penelitian dilakukan di desa Kecamatan Sayung.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian (i) Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (ii) Apakah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (iii) Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (iv) Apakah Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB 2

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Stewardship Theory

Menurut Donaldson & Davis (1991) dalam Atikah (2019), *stewardship theory* adalah suatu keadaan dimana para manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu tetapi sasaran utamanya yaitu untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia, bahwa pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, serta memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang diharapkan para pemangku kepentingan dalam hubungan fidusia (hubungan berlandaskan kepercayaan). Sehingga pada teori ini, manajer dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan yang baik bagi kepentingan publik dan pemangku kepentingan (Atikah, 2019).

Pemerintah sebagai *steward* yaitu penerima tanggungjawab yang harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan pengguna informasi laporan keuangan desa. *Stewardship theory* berkaitan dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan jika pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, maupun membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi bisa terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dengan tujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Indonesia, 2010).

Laporan keuangan disusun guna memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk menilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yaitu Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami (Indonesia, 2010).

2.3 Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, Desa adalah unit pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (Bupati Demak, 2018).

Untuk menjalankan tugas seorang Aparatur Desa (Perangkat Desa) harus memiliki kompetensi yang mendukung untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Kompetensi sendiri diartikan sebagai sebuah kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Dalam penelitian (Wonar et al., 2018) dijelaskan bahwa ada tiga tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh Aparatur Desa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan

manajemen; 3) kemampuan teknis. Aparatur Desa harus memiliki kompetensi berupa kemampuan untuk mengetahui tentang regulasi desa, kemampuan dalam mengetahui yang menjadi dasar dalam pemerintahan desa, dan kemampuan dalam mengetahui tugas pokok dan fungsi. Aparatur Desa juga harus memiliki kemampuan manajemen, diantaranya manajemen sumber daya alam, manajemen pelayanan public, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan kompetensi teknis menurut Asrori (2014) dalam (Wonar et al., 2018) yaitu kemampuan Aparatur Desa dalam menyusun administrasi desa, serta melakukan pelayanan publik.

2.4 Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (BPKP.). SISKEUDES dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi, penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang sesuai dengan aturan akan memudahkan dalam membuat suatu laporan keuangan sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji dan laporan keuangan yang dibuat menggunakan SISKEUDES akan lebih berkualitas, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan (Permendagri, 2018).

2.5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-perundangan. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan termasuk pemerintah desa. Sistem Pengendalian Intern diterapkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah, yaitu a) kegiatan yang efektif dan efisien; b) laporan keuangan yang andal; c) keamanan aset Negara (Indonesia).

2.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan berkualitas yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Indonesia, 2010).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, berikut hasil penelitian terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh hendra lesmana (2021) yaitu pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic, uji asumsi klasik yang terdiri uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas dan uji hipotesis dengan menggunakan uji persamaan regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji R². Dengan hasil

penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Lesmana, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Sahidah (2020) Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SISKEUDES, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pemerintah Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan memperoleh 17 desa dan 68 pejabat pemerintah di divisi keuangan Sangki Sangkapura yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala perencanaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kompetensi dan teori penggunaan keputusan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji outer model, uji inner model, uji hipotesis, dan analisis statistik deskriptif menggunakan SmartPLS 3.0 Kompetensi SDM dan Penerapan SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Desa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik (Sahidah, 2020).

Penelitian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai oleh Oleh Yuliana Sueng, Sulaiman,, Suryaningsi (2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif . teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di 10 desa Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan jumlah sampel 30 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan untuk pengujian analisis data digunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, statistik deskriptif, analisis linier berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji F. hasil penelitian ini yaitu Penerapan SAP dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan(Yuliana, 2020)

Penelitian oleh Alvina Ghina Riyanita dan Harjanti Widiastuti (2020) yaitu Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kabupaten Sleman). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui pembagian kuesioner ke 35 desa yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah reponden 111 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji agresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa sedangkan variabel pelatihan yang diikuti oleh aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Riyanita, 2020)

Penelitian oleh Ratmi Dewi, Jan Hoesada (2020) yaitu *the effect of government accounting standards, internal control systems, competence of human resources, and use of information technology on quality of financial statements*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.(Hoesada, 2019).

Penelitian Oleh Raidah Abdillah, Rahma Nazilla, Arif Apriadi (2021) yaitu Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan SISKEUDES Terhadap Kualitas Laporan Dana Desa (Survey Pada Desa-Desa di Kecamatan Arjasari). Hasil penelitian ini adalah Kompetensi Perangkat Desa, Penerapan SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dana desa.

2.8 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi sendiri harus dimiliki oleh setiap individu agar dapat mendukung peningkatan kinerja dari aparatur desa. Dengan baiknya kompetensi yang dimiliki, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena didukung dengan adanya aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai pada bidangnya, serta dapat meminimalisir kemungkinan salah saji yang disebabkan oleh kelalaian dari aparatur desa. *Stewardship theory* menyatakan bahwa manajemen cenderung terdorong untuk bertindak dalam kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Oleh karena itu peran kompetensi aparatur desa sangat diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas (Atikah, 2019)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Fitri (2021) dan Raidah (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan serangkaian aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar akuntabel dan transparan (BPKP). Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi acuan bagi desa untuk menerapkan SISKEUDES dalam setiap program dan kegiatan serta menjadikan penggunaan SISKEUDES wajib dilakukan oleh setiap desa agar informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Permendagri, 2018). *Stewardship theory* menggambarkan hubungan antara kepuasan masyarakat dengan kesuksesan pemerintah desa dalam mengungkapkan dengan jelas dan rinci terkait informasi keuangan yang sesuai dengan penggunaan SISKEUDES dalam pembuatan laporan keuangan (Atikah, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan Raidah (2021), Sahidah (2020), Atikah (2019), dan Mahdiah (2021) Penerapan SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan dana desa. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern memiliki tujuan agar kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjamin keandalan data yang dihasilkan. Salah satu karakteristik kualitatif dari kualitas laporan keuangan adalah relevansi dan keterandalan. Keterandalan informasi laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik. Berdasarkan *stewardship theory* semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas dalam organisasi, manajemen kesulitan untuk menjalankan sendiri fungsi pengelolaan keuangannya. Untuk itu perlu adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan dengan fungsi pengelolaan agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang relevan dan andal (Atikah, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvina (2020), Khoirina (2018), Atikah (2019) dan Hendra (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, jika penerapan sistem pengendalian internal baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

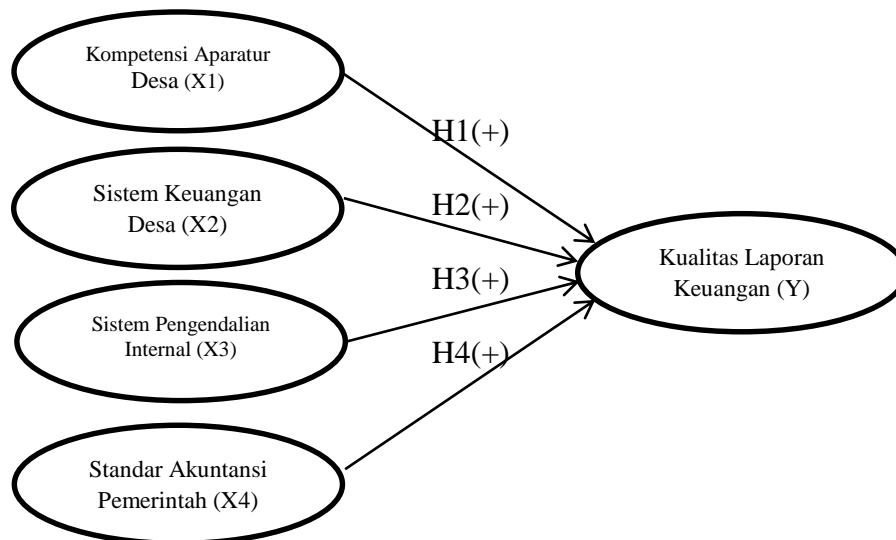
H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

d. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai persyaratan hukum dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Hubungan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berbanding secara linier (searah). Hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah (Indonesia, 2010). Berdasarkan *stewardship theory* menyatakan semakin banyaknya tuntutan akan informasi laporan keuangan, *steward* (pemerintah) sebagaimana mandat dari principal (rakyat) harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dalam menjalankan upaya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, telah dimandatkan untuk mengetahui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2020) dan Hendra (2021) menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H4 : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.9 Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

Sumber: Dikembangkan untuk studi skripsi ini, 2022

Keterangan: X1 = Kompetensi Aparatur Desa
X2 = Sistem Keuangan Desa
X3 = Sistem Pengendalian Internal
X4 = Standar Akuntansi Pemerintah
Y = Kualitas Laporan Keuangan

BAB 3

Metode Penelitian

3.1 Definisi Konsep Variabel

Definisi konsep adalah sifat atau nilai atau atribut dari orang atau objek atau kegiatan yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari, diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Variabel – variabel penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok variabel yaitu variabel dependen dan independen. Variabel Independen penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur Desa, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Y). Variabel dependen sering disebut variabel terikat atau sebagai variabel kriteria, konsekuen, dan output (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan variabel Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan, dimana kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen sering disebut variabel bebas atau variabel predictor dan stimulus (Sugiyono, 2018). Variabel Independen penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur Desa, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Indonesia, 2010):

1. Relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan. yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami. yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah

a) Kompetensi Aparatur Desa

Indikator yang digunakan untuk mengukur Kompetensi Aparatur Desa (Nurkhasanah, 2019):

1. Pemahaman
2. Pelatihan

3. Inisiatif dalam bekerja

b) Penerapan Sistem Keuangan Desa

Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan Sistem Keuangan Desa (BPKP)

1. Kualitas Sistem
2. Penggunaan
3. Kepuasan
4. Dampak individu
5. Dampak organisasi

c) Sistem Pengendalian Internal

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sistem Pengendalian Internal (Atikah, 2019)

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

d) Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator yang digunakan untuk mengukur Standar Akuntansi Pemerintahan (Atikah, 2019)

1. PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No.3 tentang Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas
4. PSAP No.4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP No.5 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
9. PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban. kewajiban
10. PSAP No 10 Koreksi Kesalahan
11. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang mengelola laporan keuangan desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria yaitu Aparatur Desa yang mengelola laporan keuangan desa. Dimana masing-masing desa diambil 3 orang yang akan dimintai informasi tentang laporan keuangan desa, yaitu: kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data yang digunakan adalah jenis data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan metode survey. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang ditujukan kepada pengelola keuangan desa di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan membuat kuesioner yang akan dibagikan ke responden untuk diisi. Pertanyaan dan pilihan jawaban dalam kuesioner dibuat berdasarkan variabel-variabel yang diukur. Kuesioner akan diberikan langsung ke responden, kuesioner akan dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah penyerahan. Pengukuran menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5 dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

- a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
- b. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4
- c. Jawaban Kurang Setuju (KS) diberi skor 3
- d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS). PLS sendiri merupakan metode pengujian persamaan struktural dengan pengujian persamaan model pengukuran atau biasa di kenal sebagai *outer model* dan *inner model*. Pengukuran ini akan menunjukkan bagaimana sejumlah indikator variabel mempresentasikan variabel laten untuk diukur. Menurut (Imam Ghozali, 2021) salah satu tujuan analisis PLS yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh atau hubungan antar variabel laten

3.6.1 Pengujian Outer Model

Tahap pengujian model pengukuran meliputi pengujian *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Hasil analisis PLS dapat digunakan untuk menguji hipotesis apabila semua indikator dalam model PLS telah memenuhi syarat *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability* (Trisnawati, 2021).

a. Convergent Validity

Convergent validity adalah mengukur validitas indikator sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat dari nilai *outer loading* dari masing-masing indikator variabel. Suatu indikator memiliki tingkat validasi yang baik apabila memiliki *outer loading* >0.70, maka jika nilai *outer loading* dibawah 0.70 dihapus dari model pengujian. Validitas konvergen juga dinilai dari nilai AVE tiap konstruk. Nilai AVE harus lebih tinggi, ketika nilai AVE dibawah 0,50 maka dianggap memiliki error yang tinggi (Setiaman, 2020).

b. Discriminant Validity

Setiaman (2020) mengungkapkan validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur konstruksi yang berbeda tidak boleh dikorelasikan. Model validitas diskriminan yang baik jika nilai kuadrat AVE pada setiap konstruk eksogen (nilai pada diagonal) melebihi korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya (nilai di bawah diagonal).

c. Composite Reliability

Reliabilitas komposit digunakan sebagai alternatif dari *crombachs alpha* dan untuk mengukur *convergent validity* (Setiaman, 2020). Nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* yang disarankan lebih dari 0,7.

3.6.2 Pengujian Inner Model

Pengujian *inner model* atau model struktural meliputi uji signifikansi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengukuran besar pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam penelitian (Trisnawati, 2021). Semua pengujian ini akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

a. Pengujian Goodness of fit model

Goodness of fit model merupakan evaluasi model pengukuran dengan melihat validitas dan reliabilitas (Setiaman, 2020). Pada PLS dinyatakan telah memenuhi syarat apabila nilai SRMR < 0,100. Jika, nilai SRMR <0.100 maka memiliki kecocokan yang baik.

b. Pengujian Pengaruh Langsung

Trisnawati (2021) menjelaskan uji signifikansi pengaruh langsung digunakan untuk menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Ho : variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel endogen

Ha : variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen

Karena hipotesis penelitian merupakan hipotesis satu arah, maka Ho ditolak dan disimpulkan bahwa variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen jika $P\ value < 0,05$ dan $t\ hitung > 1,65$, sedangkan jika $p\ value > 0,05$ dan $t\ hitung < 1,65$ maka Ho tidak ditolak dan disimpulkan bahwa variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel endogen.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menggambarkan besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pada analisis PLS, koefisien determinasi dilihat dari *R-Square* dengan nilai 0-1. Semakin tinggi *R-Square* semakin tinggi pula kontribusi variabel eksogen terhadap endogen (Trisnawati, 2021).